



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI RAHA TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI RAHA
JL. M.H THAMRIN NO.33, RAHA-SULTRA
Telp. (0403) 2521015-2521045
Fax. (0403) 2521015
Email : pnraha@yahoo.com
Website: www.pn-raha.go.id

Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan nikmatNYA kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan untuk mengemban tugas untuk mewujudkan cita - cita bangsa kearah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Raha tahun 2022 ini merupakan penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan selama satu tahun anggaran pada tahun 2022 yang penyusunannya disesuaikan dengan outline Laporan Tahunan berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2876/SEK/OT 01.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini akan menjadi pedoman untuk perbaikan kinerja pada Pengadilan Negeri Raha dan segala kendala serta harapan, mendapat perhatian yang selanjutnya dapat ditindak lanjuti.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022 ini.

Raha, 6 Januari 2023



DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum Pengadilan.....	1
B. Visi dan Misi	1
C. Rencana Strategis	3
BAB II	4
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Raha	4
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	4
- Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	5
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	6
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	6
B. Penyelesaian Perkara.....	7
- Jumlah sisa perkara yang diputus	7
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.....	9
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.....	9
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi.....	10
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.....	10
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan).....	10
- Pos Bantuan Hukum (Posbakum).....	11
- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.....	13
- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)	13
BAB III	14
SUMBER DAYA MANUSIA.....	14
Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/ Golongan / Pendidikan.....	14
- Mutasi	14
- Promosi	15
- Pensiun.....	15
- Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	15
BAB IV.....	17
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	17
A. Pengelolaan Keuangan	17
1. Belanja Pegawai	17
2. Belanja Barang	17
3. Belanja Modal	18

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	18
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	24
BAB V.....	27
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	27
- Akreditasi Penjamin Mutu	27
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	28
- Inovasi Pelayanan Publik.....	29
BAB VI.....	33
PENGAWASAN.....	33
A. Internal	33
B. Evaluasi.....	35
BAB VII.....	37
PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37
B. Rekomendasi	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Pengadilan

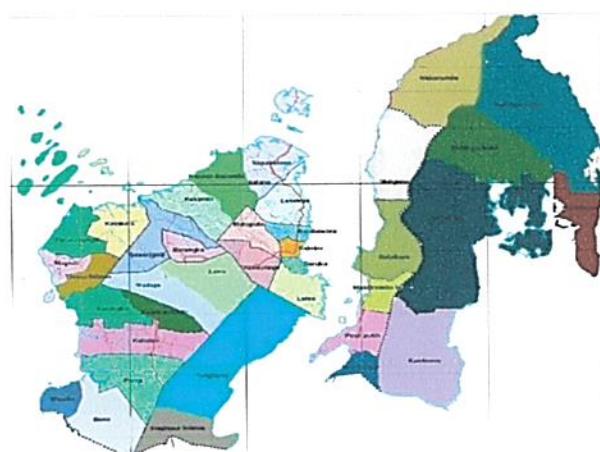
Pengadilan Negeri Raha merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok :

1. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, baik perkara-perkara pidana dan perdata di tingkat pertama
2. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya
3. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Raha termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan daerah hukumnya meliputi 3 Kabupaten, menjadi :

1. Kabupaten Muna
2. Kabupaten Muna Barat
3. Kabupaten Buton Utara

PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI RAHA



B. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Raha :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Raha yang Agung”

Misi Pengadilan Negeri Raha :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Raha;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Raha;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Raha.

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah:

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

- a. Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*).
- b. Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*) Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan.

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biayaringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. **Keterbukaan** (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*)Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.
6. **Ketidakberpihakan** (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*)Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.
7. **Perlakuan yang sama di hadapan hukum** (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*)Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

C. Rencana Strategis

Dalam rangka menunjang terealisainya visi dan misi tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Raha telah menentukan rencana strategis sebagai berikut :

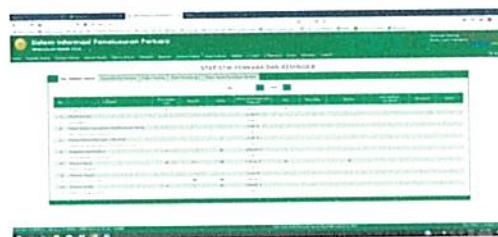
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Peningkatan tertib administrasi perkara
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
6. Peningkatan pelayanan Peradilan
7. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Raha

Jumlah keadaan perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata pada Pengadilan Negeri Raha tahun 2022 dapat dilihat melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Raha. Dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, semua proses perkara dilaksanakan sesuai SOP.



Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Adapun keadaan perkara di Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut :

- Keadaan Perkara tingkat Pertama
 - a) Perkara Pidana
 - Pidana Biasa :

Sisa Perkara Tahun 2021	: 1 Perkara
Perkara Masuk	: 195 Perkara
Perkara Putus	: 196 Perkara
Sisa Perkara	: --
 - Pidana Anak
 - a. Sisa Perkara Tahun 2021 : --
 - b. Perkara Masuk : 31 Perkara
 - c. Perkara Putus : 31 Perkara
 - d. Sisa Perkara : --
 - Pidana Cepat
 - a. Sisa perkara Tahun 2021 : --
 - b. Perkara Masuk : 3 Perkara
 - c. Perkara Putus : 3 Perkara
 - d. Sisa Perkara : --

- Praperadilan
 - a. Sisa Perkara Tahun 2021 : --
 - b. Perkara Masuk : --
 - c. Perkara Putus : --
 - d. Sisa Perkara : --
 - Lalu Lintas
 - a. Sisa Perkara Tahun 2021 : --
 - b. Perkara Masuk : 1940 Perkara
 - b. Perkara Putus : 1940 Perkara
 - c. Sisa Perkara : --
- b) Perkara Perdata
- Gugatan
 - a. Sisa Perkara Tahun 2021 : 8 Perkara
 - b. Perkara Masuk : 12 Perkara
 - c. Perkara Putus : 18 Perkara
 - d. Sisa Perkara : 2 Perkara
 - Gugatan Sederhana
 - a. Sisa Perkara Tahun 2021 : --
 - b. Perkara Masuk : 2 Perkara
 - c. Perkara Putus : 2 Perkara
 - d. Sisa Perkara : --
 - Permohonan
 - a. Sisa Perkara Tahun 2021 : --
 - b. Perkara Masuk : 61 Perkara
 - c. Perkara Putus : 61 Perkara
 - d. Sisa Perkara : --
- Keadaan Perkara Tingkat Banding
- a) Perkara Pidana Biasa
- a. Sisa Perkara Tahun 2021 : 5 Perkara
 - b. Perkara Masuk : 39 Perkara
 - c. Perkara Putus : 31 Perkara
 - d. Sisa Perkara : 8 Perkara

b) Perkara Pidana Anak

- a. Sisa Perkara Tahun 2021 : --
- b. Perkara Masuk : 2 Perkara
- c. Perkara Putus : 2 Perkara
- d. Sisa Perkara : --

c) Perkara Perdata

- Gugatan
 - a. Sisa Perkara Tahun 2021 : 1 Perkara
 - b. Perkara Masuk : 9 Perkara
 - c. Perkara Putus : 8 Perkara
 - d. Sisa Perkara : 2 Perkara

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

a) Perkara Pidana

- Perkara Pidana Biasa
 - a. Sisa Perkara Tahun 2021 : 4 Perkara
 - b. Perkara Masuk : 26 Perkara
 - c. Perkara Putus : 16 Perkara
 - d. Sisa Perkara : 14 Perkara
- Perkara Pidana Anak
 - a. Sisa perkara tahun 2021 : --
 - b. Perkara Masuk : 2 Perkara
 - c. Perkara putus : --
 - d. Sisa Perkara : 2 Perkara

b) Perkara Perdata

- Gugatan
 - a. Sisa Perkara Tahun 2021 : 1 Perkara
 - b. Perkara Masuk : 3 Perkara
 - c. Perkara Putus : 2 Perkara
 - d. Sisa Perkara : 2 Perkara

- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

a) Perkara Pidana

- a. Sisa Perkara Tahun 2021 : --
- b. Perkara Masuk : --
- c. Perkara Putus : --

- d. Sisa Perkara : -
- b) Perkara Perdata
- a. a. Sisa Perkara Tahun 2021 :--
 - b. b. Perkara Masuk :--
 - c. b. Perkara Putus :--
 - d. c. Sisa Perkara :--

Keadaan Perkara pidana dan perkara perdata pada Pengadilan Negeri
Raha Tahun 2022

No	Perkara	Sisa Perkara Tahun lalu	Perkara Masuk	Perkara Yang diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1.	Pidana Biasa	1	195	196	-	
2.	Pidana Khusus Anak	-	31	31	-	
4.	Pidana Cepat	-	3	3	-	
5.	Pidana Praperadilan	-	-	-	-	
6.	Perkara Lalu-Lintas	-	1940	1940	-	
7.	Gugatan	8	12	18	2	
8.	Permohonan	-	61	61	-	
9.	Gugatan Sederhana	-	2	2	-	

B. Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri Raha pada Tahun 2022 berusaha agar menyelesaikan semua perkara yang masuk. Namun sampai dengan akhir tahun 2022 ternyata terdapat beberapa perkara yang masih dalam proses berperkara. Kurangnya hakim, dan meningkatnya jumlah perkara pada tahun 2022 menjadi faktor yang mempengaruhi kecepatan dalam menyelesaikan sebuah perkara.

- Jumlah sisa perkara yang di putus

a) Perkara Pidana

a. Pidana Biasa

Jumlah perkara Pidana Biasa pada tahun 2022 ditambah tahun sebelumnya adalah 196 (seratus sembilan puluh enam) Perkara. Semua perkara tersebut dapat diselesaikan hingga tanggal 30 Desember 2022, sehingga tidak ada perkara pidana biasa yang belum putus pada Pengadilan Negeri Raha

b. Pidana anak

Pada tahun 2022 jumlah perkara pidana anak yang masuk adalah 31 (tiga puluh satu) perkara. Semua perkara anak tersebut dapat di selesaikan, sehingga tidak ada sisa perkara anak yang belum diselesaikan pada Pengadilan Negeri Raha.

c. Pidana Cepat

Pada tahun 2022 jumlah perkara pidana cepat yang masuk adalah 3 (tiga) Perkara dan semuanya dapat diselesaikan. Sehingga pada akhir tahun 2022 tidak ada sisa perkara pidana cepat pada Pengadilan Negeri Raha.

d. Praperadilan

Pada tahun 2022 tidak ada perkara praperadilan yang masuk pada Pengadilan Negeri Raha.

e. Lalu Lintas

Dari 1940 (seribu Sembilan ratus empat puluh) Perkara yang masuk pada tahun 2022, semuanya dapat diselesaikan sehingga pada tahun 2022 tidak ada sisa perkara Lalu Lintas pada Pengadilan Negeri Raha

b) Perkara Perdata

a. Gugatan

Jumlah gugatan pada tahun 2022 ditambah tahun sebelumnya di Pengadilan Negeri Raha adalah 20 (dua puluh) Perkara. Sampai dengan akhir Desember 2022, sisa gugatan yang belum putus adalah 2 (dua) Perkara

b. Gugatan Sederhana

Dari 2 (dua) Perkara Gugatan Sederhana yang masuk, semuanya dapat diselesaikan. Sehingga tidak ada sisa perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Raha.

c. Permohonan

Dari 61 (enam puluh satu) Perkara Permohonan yang masuk, semuanya dapat diselesaikan. Sehingga tidak ada sisa perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Raha.

- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu
 - a) Perkara Pidana

Dari keseluruhan perkara Pidana yang masuk pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Raha, tidak ditemukannya perkara putus yang mencapai 150 (seratus lima puluh) Hari.
 - b) Perkara Perdata

Dari Keseluruhan perkara Perdata yang masuk pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Raha, tidak ditemukannya perkara putus yang mencapai 150 (seratus lima puluh) Hari.
- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi, dan PK
 - 1. Banding
 - a) Perkara Pidana

Dari 196 (seratus Sembilan puluh enam) perkara yang putus di Pengadilan Negeri Raha, sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding.
 - b) Perkara Perdata

Dari 81(delapan puluh satu) Perkara Perdata yang putus di Pengadilan Negeri Raha. Sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding
 - 2. Kasasi
 - a) Perkara Pidana

Dari 35 (tiga puluh lima) Perkara yang diputus pada tingkat banding, terdapat 9 (sembilan) perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
 - b) Perkara Perdata

Dari 8 (delapan) Perkara yang diputus pada tingkat banding, ada 5 (lima) perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
 - 3. PK (Peninjauan Kembali)
 - a) Perkara Pidana

Dari semua Perkara pidana yang masuk pada tahun 2022, tidak terdapat Perkara yang mengajukan upaya hukum
 - b) Perkara Perdata

Dari semua perkara perdata yang masuk pada tahun 2022, tidak terdapat perkara yang melakukan upaya hukum.

- Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi.
Pengadilan Negeri Raha senantiasa melakukan Mediasi kepada para pihak yang berperkara sebelum memasuki tahapan pokok gugatan. Dari 9 (Sembilan) Perkara mediasi yang di lakukan oleh Pengadilan Negeri Raha kepada pihak yang berperkara pada tahun 2022 hanya 1 (satu) perkara yang berhasil di mediasi dan 8 perkara yang tidak berhasil di mediasi.
- Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi
Adapun perkara anak yang diperiksa di Pengadilan Negeri Raha pada tahun 2022 berjumlah 24 (dua puluh empat) Perkara. Sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara yang berhasil diselesaikan melalui Diversi dan 3 (tiga) perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui Diversi.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)

Pengadilan Negeri Raha terus berbenah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Muna, Muna Barat dan Buton Utara. Hal ini disebabkan karena pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan menjadi salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan. Selanjutnya, sertifikat jaminan mutu pelayanan peradilan harus dimiliki oleh setiap pengadilan di semua lingkungan Peradilan. Mahkamah Agung juga memandang penting peningkatan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan karena hal tersebut akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Badan Peradilan. Sinergitas internal dan eksternal harus dibangun agar perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua yakni mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung.

Pengadilan Negeri Raha yang merupakan salah satu Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, telah Mendapatkan Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai nilai A (excellent), yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor: 1045/DJU/SK/OT01.3/3/2021 pada tanggal 10 Maret 2021 di Jakarta . Selain itu, Pengadilan Negeri Raha juga memperoleh predikat sebagai terbaik Harapan II dalam lomba bagi satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022 sesuai Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 2472/DJU/SK/HM.02.3/12/2022 tanggal 9 Desember 2022 untuk kategori Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.



- Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum Pengadilan Negeri adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri Raha ditahun 2022 telah memberikan layanan Posbakum terhadap masyarakat pencari keadilan, dengan menunjuk LBH Pemerhati Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PEKHAM). Layanan Posbakum yang di berikan adalah sesuai dengan Sesuai PERMA NO. 1 Tahun 2014 Pasal 25 yang meliputi Pemberian informasi ,konsultasi,atau aktivis hukum, Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Penyedian informasi daftar organisasi bantuan hukum. Penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, atau saksi; Posbakum dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama; dan bantuan hukum yang diberikan pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap; itu artinya layanan Posbakum dilakukan mulai pada saat perkara masuk ke pengadilan tingkat pertama sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Layanan Posbakum LBH PEKHAM telah dilakukan di Pengadilan Negeri Raha selama 12 Bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022.

Daftar pengurus Posbakum LBH PEKHAM Pada Pengadilan Negeri Raha

No	Nama Posbakum	Anggota	Alamat	Keterangan
1	LBH PEKHAM	1. MUH.AKSAN AKBAR, S..H., M.H.	RAHA	KETUA
		2. JUMANUDIN, S.H., M.H.	LAWORO	WAKIL KETUA
		3. MACHDIN, S.H.	RAHA	SEKRETARIS
		4. LAODE MUH. FAJAR INDASA, S.H.	RAHA	BENDAHARA
		5. LA JAMULI, S.H.	RAHA	ADVOKAD
		6. MUHAMMAD SADAM SAFA, S.H.	RAHA	ADVOKAD
		7. LA ODE ALMARDAN MOMO, S.H.	RAHA	ADVOKAD
		8. RUSMAN MALIK, S.H.	LAWORO	ADVOKAD
		9. ALI BASRI, S.H.	KENDARI	ADVOKAD
		10. MUHAMMAD DARUN ISLAH, S.H.	RAHA	STAF ADMINISTRASI

Selama masa setahun layanan Posbakum LBH PEKHAM di Pengadilan Negeri Raha telah menghasilkan volume layanan kepada masyarakat pencari keadilan, dengan rincian sebagai berikut :

Laporan Posbakum pada Pengadilan Negeri Raha

No	Nama Posbakum	Jumlah Layanan	Keterangan
1	LBH PEKHAM	81 Perkara Pidana	Semua perkara telah putus

- **Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu**

Sidang Keliling pada Pengadilan Negeri Raha pada tahun 2022 Tidak dilaksanakan karena tidak terdapatnya anggaran pada kegiatan Sidang Keliling

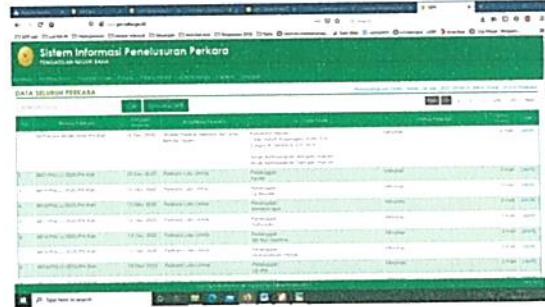
- **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Perkara Prodeo atau pembebasan biaya perkara untuk masyarakat para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, setiap tahun tidak pernah ada yang mengajukan perkara prodeo ke Pengadilan Negeri Raha sehingga tidak dapat dilaksanakan atau tidak pernah terpakai anggaran yang sudah di anggarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun anggaran 2022 anggaran perkara Prodeo pada Pengadilan Negeri Raha memang tidak disediakan .

Sepanjang Tahun 2022 Pengadilan Negeri Raha, telah mengaplikasikan Standar Operasional Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara secara tertib, sehingga semua proses perkara dilaksanakan sesuai SOP baik administrasi manual maupun pada aplikasi SIPP. Transparansi Informasi Proses perkara juga dapat dipublikasikan dengan baik melalui aplikasi SIPP web yang beralamat di <http://sipp.pn-raha.go.id>, sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung informasi dengan mudah baik langsung akses ke alamat tersebut ataupun mengunjungi website resmi Pengadilan Negeri Raha.



WEBSITE PN-RAHA



SIPP WEB PN-RAHA

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / PENDIDIKAN

Jumlah SDM pada Pengadilan Negeri Raha adalah 40 Orang, terdiri atas 31 orang Pegawai Negeri Sipil, dan 9 Orang pegawai Honorer. Komposisi SDM pada Pengadilan Negeri Raha berdasarkan Pangkat / Golongan / Pendidikan, dapat dilihat pada daftar di bawah ini:

No	NAMA UNIT	GOL.	JENIS KELAMIN		JUMLAH	JENIS PENDIDIKAN												KET
			L	P		S.2	S.1		D.3		SMA		SMP		SD.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PENGADILAN NEGERI RAHA	IV/b	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jumlah Pegawai PN Raha 31 orang / 31 Desember 2022
	III/d	3	-	3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	III/c	8	4	12	-	-	6	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
	III/b	6	1	7	2	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	III/a	2	2	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	II/c	2	1	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	II/b	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	23	8	31	3	-	14	6	1	-	5	1	-	-	-	-	

- Mutasi

Pada Tahun 2022 terdapat 2 (dua) orang pegawai yang di mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Raha, dan terdapat 3 (tiga) orang pegawai yang dimutasi Keluar dari Pengadilan Negeri Raha. Table mutasi sebagai berikut:

MUTASI MASUK :

No	Unit kerja Asal	Nama Pegawai	Unit kerja Tujuan	Keterangan
1	PN Unaaha	M. Nasir	PN Raha	Sekretaris
2	PN Tahuna	Ajidin La Baili, S.H.	PN Raha	Panitera Muda Hukum

MUTASI KELUAR

No	Unit kerja Asal	Nama Pegawai	Unit kerja	Keterangan
			Tujuan	
1	PN RAHA	ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H.,M.H.	PN Blora	Hakim
2	PN RAHA	MUHAMMAD ABDUH, S.E.	PN Unaaha	Sekretaris
3	PN RAHA	DARWIS, S.H.	PN Kendari	Panitera Muda Hukum

- **Promosi**

- 1. Promosi Jabatan Struktural**

Pada tahun 2022 terdapat promosi jabatan struktural yaitu Ketua dan Panitera Muda Hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya mutasi Pimpinan dan Panitera Muda Hukum ke satuan kerja yang lain sehingga jabatan tersebut menjadi tidak terisi. Oleh karena itu, ada pegawai yang di promosikan untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut pada Pengadilan Negeri Raha.

- 2. Promosi Jabatan Teknis**

Pada Tahun 2022 terdapat Promosi Jabatan Teknis yaitu Panitera Pengganti. Hal ini disebabkan oleh keadaan jumlah perkara pada Pengadilan Negeri Raha semakin bertambah sehingga ada pegawai yang di promosikan untuk menduduki Jabatan tersebut pada Pengadilan Negeri Raha.

- **Pensiun**

Pada tahun 2022, tidak terdapat pegawai yang pensiun, maka Pengadilan Negeri Raha saat ini belum ada pengurangan jumlah Pegawai.

- **Diklat (SDM Teknis / Non Teknis)**

Pada Tahun 2022 terdapat 4 orang pegawai yang di mengikuti Diklat Teknis, dan terdapat 5 pegawai yang mengikuti Diklat Non Teknis. Tabel diklat adalah sebagai berikut :

DIKLAT TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT
1	Muhammad Sukamto, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Raha	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Negeri - Pelatihan teknis yudisial bukti elektronik - Pelatihan teknis yudisial Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
2	Ari Conardo, S.H.	Hakim	Diklat Hakim Berkelanjutan Lingkungan Peradilan Umum
3	Abdul Hafid, S.H.	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Negeri
4	Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Negeri - Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/ Panitera Pengganti Tingkat Pertama Peradilan Umum

DIKLAT NON TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT
1	Rizky Hendra Budi Prakoso, A.Md	Arsiparis	Latihan Dasar CPNS Golongan II
2	Veronica Sri Yunitasari, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	<ul style="list-style-type: none"> - Effective Presentation - Pelatihan Agile Scrum Master
3	Hartanto Ariesyandi, S.H.	CPNS Analis Perkara Peradilan	Latihan Dasar CPNS Golongan III
4	Ivan Prana Putra, S.H.	CPNS Analis Perkara Peradilan	Latihan Dasar CPNS Golongan III
5	Rahma Aryani Poetri, A.Md	CPNS Pengelola Perkara	Latihan Dasar CPNS Golongan II

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Belanja Pegawai

a. Pagu

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2022, pagu belanja pegawai sebesar Rp. 3.424.020.000,- (Tiga Miliar empat ratus dua puluh empat juta dua puluh ribu Rupiah).

b. Realisasi

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 3.183.624.121,- (Tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah).

c. Sisa

Sisa belanja pegawai tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 240.395.879,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)

2. Belanja Barang

a. Pagu

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2021, pagu belanja barang sebagai berikut :

- DIPA 01 (099670) sebesar Rp. 1.648.223.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah)
- DIPA 03 (099671) sebesar Rp. 199.020.000,-(seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua puluh ribu Rupiah)

b. Realisasi

Realisasi belanja barang tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

- DIPA 01 (099670) sebesar Rp. 1.639.355.350,- (satu milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah.
- DIPA 03 (099671) sebesar Rp. 198.250.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

c. Sisa

Sisa belanja barang tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

- DIPA 01 (099670) sebesar Rp. 8.867.650 (delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah)
- DIPA 03 (099671) sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

3. Belanja Modal

a. Pagu

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2022, pagu belanja Modal sebesar Rp. 142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Realisasi

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2022, pagu belanja Modal sebesar Rp. 142.500.000,- seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

c. Sisa

Sisa Belanja Modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

Dengan demikian, dari hasil realisasi di atas maka persentase penyerapan anggaran yang dicapai adalah **95,22%** untuk DIPA 01 dan **99,61%** untuk DIPA 03.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kualitas Sumber Daya Manusia dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta layak merupakan faktor pendukung kinerja Pengadilan Negeri Raha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar berjalan dengan efektif dan lebih baik.



Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Raha berdiri di atas tanah seluas 4.160 m² yang penyelesaian pembangunannya dilaksanakan tahun 2016 juga telah dibarengi dengan pengadaan kelengkapan fasilitas perkantoran yang walaupun

masih jauh dari kata sempurna namun sangatlah mendukung pelaksanaan kinerja dalam menuntaskan tugas-tugas pokok sehari hari.

Adapun sarana dan prasarana gedung yang ada pada Pengadilan Negeri Raha termuat dalam daftar sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	6 bh	Tanah Rumah Dinas
2	Tanah bangunan gedung kantor	1 bh	Gedung kantor
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2 unit	Gedung Kantor
3	Rumah Negara Golongan II Type B permanen	1 unit	Rumah Dinas
4	Rumah Negara Golongan Ii Tipe C Permanen	10 Unit	Rumah Dinas

Rumah Dinas :

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1.	Rumah Dinas Ketua	1	1	-		
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-		
3.	Rumah Dinas Hakim	9	9	-		2 unit ditempati Panitera dan sekretaris

Kendaraan Dinas :

NO	URAIAN	Tahun Perolehan	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	Jenis Kendaraan Roda 4	1				
1.	Minibus Toyota Kijang Innova	2007		1		
2.	Minibus Daihatsu Xenia	2014	1			
II.	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Jupiter MX			2		
2.	Mega Pro				1	

Sarana dan Prasarana Gedung di Pengadilan Negeri Raha :

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	2	

4.	Ruang Panitera	1	
6.	Ruang Sekretaris	1	
7.	Ruang Panitera Pengganti dan Juru Sita	1	
8.	Ruang Kepaniteraan	1	
9.	Ruang Kesekretariatan	1	
10.	Ruang Panitera Muda Hukum	1	
11.	Ruang Bapas	1	
12.	Ruang Sidang	2	
13.	Ruang Sidang Anak	1	
14.	Ruang Jaksa	1	
15.	Ruang Tahanan	2	
16.	Ruang Petugas Polisi	1	
17.	Ruang Ramah Anak	1	
18.	Ruang Mediasi/Kaukus/Diversi	1	
19.	Ruang Teleconferense	1	
20.	Ruang Tamu Terbuka	1	
21.	Ruang Posbakum	1	
22.	Ruang Arsip	2	
23.	Ruang Perpustakaan	1	
24.	Ruang Rapat	1	
25.	Ruang Laktasi	1	
26.	Ruang Barang Bukti	1	
27.	Ruang Pantri	1	
28.	Ruang Koperasi	1	
29.	Ruang Dharmayukti	1	
30.	Ruang Serbaguna	1	
31.	Ruang Olahraga	1	
32.	Ruang Kantin	1	
33.	Ruang Gudang	2	

Sarana dan Prasarana Fasilitas di Pengadilan Negeri Raha :

NO	URAIAN	JUMLAH	Keterangan
	Tanah		
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4,375 M ²	
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,159 M ²	
	Peralatan Dan Mesin		
3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2 Unit	
4.	Sepeda Motor	3 Unit	
5.	Stair Stope Generator Unit	- Buah	
6.	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	- Buah	
7.	Mesin Ketik Manual Standard (14 - 16 Inch)	- Buah	

8.	Mesin Ketik Manual Langewagon (18 – 27 Inch)	- Buah	
9.	Mesin Hitung Elektronik / Calculator	- Buah	
10.	Mesin Stensil Manual Folio	- Buah	
11.	Lemari Kayu	38 Buah	
12.	Rak Besi	11 Buah	
13.	Rak Kayu	5 Buah	
14.	Filing Cabinet Besi	3 Buah	
15.	Filing Cabinet Kayu	1 Buah	
16.	Brandkas	2 Buah	
17.	Locker	1 Buah	
18.	CCTV-Camera Control Television System	1 Buah	
19.	Papan Visual/ Papan Nama	21 Buah	
20.	Alat Detector Barang Terlarang/ X-Ray	1 Buah	
21.	Peta	1 Buah	
22.	LCD Projector/Infocus	1 Buah	
23.	Perkakas Kantor Lainnya	3 Buah	
24.	Meja Kerja Kayu	60 Buah	
25.	Kursi besi / metal	90 Buah	
26.	Kursi kayu	8 Buah	
27.	Sice	10 Buah	
28.	Bangku panjang kayu	10 Buah	
29.	Meja Rapat	3 Buah	
30.	Tempat tidur kayu	3 Buah	
31.	Meja telepon	1 Buah	
32.	Meja resepsionis	2 Buah	
33.	Kasur/ spring bed	2 Buah	
34.	Sketsel	- Buah	
35.	Meja makan kayu	2 Buah	
36.	Jam elektronik	2 Buah	
37.	Mesin pemotong rumput	1 Buah	
38.	Lemari es	1 Buah	
39.	A.C. window	1 Buah	
40.	A.C split	26 Buah	
41.	Kipas Angin	- Buah	
42.	Televisi	2 Buah	
43.	Sound system	1 Buah	
44.	Lambang garuda pancasila	2 Buah	
45.	Gambar presiden / wakil presiden	2 Buah	
46.	Tiang bendera	4 Buah	
47.	Pataka	- Buah	
48.	Kaca Hias	4 Buah	
49.	Mimbar/Podium	1 Buah	
50.	Palu sidang	- Buah	
51.	Gordyn / Kray	107 Buah	
52.	Uninterruptible Power Supply(UPS)	5 Buah	
53.	Finger Printer Time and Attandance Access Control System	1 Buah	
54.	Asbak tinggi	- Buah	
55.	Facsimile	- Buah	

56.	Local battery telephone	- Buah	
57.	CT scanner	1 Buah	
58.	Therme P.A.C	1 Buah	
59.	TV Monitor	3 Buah	
60.	Stabilizer/UPS	2 Buah	
61	Kamera Digital	1 Buah	
62	GPS	1 Buah	
63	Komputer Jaringan Lainnya	1 Buah	
64	P.C. unit	28 Buah	
65	Laptop	35 Buah	
66	CPU (Peralatan Mainframe)	- Buah	
67	Papan pengumuman	1 Buah	
68	Sofa	1 buah	
69	Portable air conditioner (alat pendingin)	4 buah	
70	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16 Buah	
71	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 Buah	
72	Peralatan Jaringan Lainnya	1 Buah	
73	Peralatan Bantu Lainnya	2 unit	
74	Server	2 buah	
75	Router	1 buah	
76	Rak Server	1 buah	
77	Genset	1 Buah	
78	Loudspeaker	4 buah	
79	Microphone	7 buah	
80	Mic Conference	1 buah	
81	Dispenser	1 buah	
82	Bracket Standing peralatan	1 buah	
83	Audio mixing console	1 buah	
84	Diaso Printer, 404	2 buah	
85	LCD Monitor	1 buah	
86	Camera Conference	1 buah	
87	Kursi Zeis	16 Buah	
88	Komputer Wedis	3 buah	
89	Air Conditioning	2 buah	
Gedung Dan Bangunan			
90	Bangunan gedung kantor permanen	2 unit	
91	Gedung garasi/ pool permanen	1 unit	
92	Rumah Negara golongan II Tipe C Permanen	11 unit	
Irigasi			
93	Sumur dengan pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1 unit	
94	Bak penyimpanan/ Tower air baku	1 unit	
Jaringan			
95	Instalasi air bersih/ air baku lainnya	1 unit	
96	Instalasi komunikasi elektronik (KOMLEK)	1 unit	
97	Jaringan sambungan ke rumah lainnya	1 unit	
Aset Tetap Lainnya			
98	Monografi	11 buah	
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan			

99	Lemari Kayu	2 buah	
100	Alat detector barang terlarang / X Ray	1 unit	
101	Meja kerja kayu	18 buah	
102	Kursi besi / metal	30 buah	
103	Kursi Kayu	22 buah	
104	Bangku panjang kayu	1 buah	
105	Meja computer	0 buah	
106	Lambang instansi	1 buah	
107	P.C Unit	1 unit	
108	Laptop	1 unit	

a. Pengadaan / Pembangunan

Selama tahun 2022 Pengadilan Negeri Raha mendapat alokasi Belanja Modal berupa :

1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi antara lain Pengadaan PC Kepaniteraan sebanyak 3 Unit dan 2 Unit Printer yang diperuntukkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha sebesar Rp. 50.500.000,- (Lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
2. Pengadaan Fasilitas dukungan sistem peradilan pidana anak antara lain Kursi dan Meja, Meja oval, Kursi, White board, Lemari Buku, Dispenser, dan Mic sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
3. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa kursi biro, layar monitor PTSP, AC Split, AC duduk PTSP, dan kursi tamu sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

b. Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan kantor terdiri dari :

1. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan termasuk halaman Kantor sebesar Rp 414.694.000.- (empat ratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah),
2. Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya berupa pemeliharaan Rumah Dinas sebanyak 11 unit dengan biaya sebesar Rp. 105.100.000,- (seratus lima puluh juta seratus ribu).
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdiri dari :
 - Perawatan Kendaraan Roda 4 sebanyak 2 Unit dengan jumlah biaya sebesar RP. 66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah)

- Perawatan Kendaraan Roda Dua sebanyak 3 unit sebesar Rp.12.000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah.)
- Personal Komputer sebanyak 12 unit dengan jumlah biaya perawatan sebesar Rp.14.600.000,-(empat belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Laptop sebanyak 15 unit dengan nilai perawatan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- AC sebanyak 17 Unit nilai perawatan sebesar Rp.3.660.000,-(tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- Printer sebanyak 10 unit dengan nilai perawatan sebesar Rp. 13.800.000,-(Tiga belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Perawatan Genset selama 1 tahun sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahan Bakar Genset selama 1 tahun sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
- Pemeliharaan CCTV selama 1 tahun sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

c. Penghapusan

Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Raha tidak ada usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) karena telah dilakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada tahun 2021.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan penunjang untuk mendukung operasional kinerja di Pengadilan baik untuk penyelesaian administrasi proses perkara dan pelayanan informasi perkara. Pada Pengadilan Negeri Raha saat ini, dukungan fasilitas komputer unit untuk memperlancar kinerja sudah terpenuhi, olehnya itu ditahun 2022 ini sesuai dengan PERMA NO.4 Tahun 2020 sebagai pembaharuan dari PERMA NO.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Electronik Pengadilan Negeri Raha telah melaksanakan dan serta telah mensosialisasikan kesemua lembaga bantuan hukum yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Raha maupun kepada Masyarakat serta instansi otonom di tiga kabupaten yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, Administrasi Perkara dan Persidangan secara Electronik (Ecourt) tentunya tidak terlepas dari proses

yang ada pada SIPP sedangkan untuk pelayanan informasi berupa aplikasi CTS (Case Tracking System) telah berjalan dengan baik ditambah dengan adanya pengadaan perangkat pendukung SIPP di tahun 2022 ini.

Dukungan Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Raha secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perangkat Lunak atau Aplikasi Pendukung

a. E-Court (ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK)

Pada tanggal 29 Maret 2018, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian pada tanggal 13 Juli 2018, Ketua MA Prof. Dr. H. M Hatta Ali, S.H., M.H. melaunching aplikasi e-court di Balikpapan.

Aplikasi E-court atau administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dipengadilan dapat diakses dengan alamat ecourt.mahkamahagung.go.id dengan akses alamat ini para Pengacara Advokat serta perseorangan dapat membuat sendiri alamat Email guna dapat terdaftar sebagai pengguna dalam prosesi pendaftaran perkara serta persidangan secara elektronik. e-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Court Mahkamah Agung RI dapat diakses melalui tautan <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Aplikasi e-Court telah di Implementasikan pada Pengadilan Negeri Raha di akhir tahun 2019, dan sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat 2 Perkara yang terdaftar melalui aplikasi e-Court.



b Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Case Tracking System (CTS)

SIPP merupakan Aplikasi berbasis Web yang menyediakan Informasi perkara mulai dari pendaftaran sampai dengan minutasi, dengan akses langsung melalui alamat <http://sipp.pn-raha.go.id/> atau mengunjungi website resmi Pengadilan Negeri Raha. Aplikasi SIPP di Pengadilan Negeri Raha saat ini menggunakan versi 5.1.0 yang terkoneksi dan dipantau oleh Mahkamah Agung. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efesien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

The screenshot shows a web-based application titled "Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI RAHA". The main page displays a table of cases with the following columns: Nomor Perkara, Tanggal Daftar, Perkara Angket, Alamat dan Permohonan, Jenis Perkara, Tempat, Status, Tgl. Tindak Lanjut, and Status Akhir. There are 10 entries listed, each with a unique case number, date filed, subject, address/claim, type, location, status, due date, and final status. The interface includes a header with various menu items and a footer with system information.

Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Perkara Angket	Alamat dan Permohonan	Jenis Perkara	Tempat	Status	Tgl. Tindak Lanjut	Status Akhir
1. 181/Pdt.Sus.2022/Pn.Raha	01 Des 2022	Percobaan Adulasi	PERMOHONAN PENGETAHUAN DENGAN DASAR UU NO. 39 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010	Percobaan	Makassar	Dituntaskan	22 Jan 2023	Selesai
2. 182/Pdt.Sus.2022/Pn.Raha	01 Des 2022	Penganiayaan	PERMOHONAN PENGETAHUAN DENGAN DASAR UU NO. 39 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010	Percobaan	Makassar	Telah Diketahui	22 Jan 2023	Selesai
3. 183/Pdt.Sus.2022/Pn.Raha	05 Nov 2022	Percobaan Adulasi	PERMOHONAN PENGETAHUAN DENGAN DASAR UU NO. 39 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010	Percobaan	Makassar	Dituntaskan	22 Jan 2023	Selesai
4. 184/Pdt.Sus.2022/Pn.Raha	05 Nov 2022	Penganiayaan	PERMOHONAN PENGETAHUAN DENGAN DASAR UU NO. 39 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010	Percobaan	Makassar	Dituntaskan	22 Jan 2023	Selesai
5. 185/Pdt.Sus.2022/Pn.Raha	05 Nov 2022	Kejahatan	PERMOHONAN PENGETAHUAN DENGAN DASAR UU NO. 39 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010	Banding	Pengadilan Perkara Kejahatan	Dituntaskan	22 Jan 2023	Selesai
6. 186/Pdt.Sus.2022/Pn.Raha	05 Nov 2022	Kejahatan	PERMOHONAN PENGETAHUAN DENGAN DASAR UU NO. 39 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010	Banding	Pengadilan Perkara Kejahatan	Dituntaskan	22 Jan 2023	Selesai
7. 187/Pdt.Sus.2022/Pn.Raha	05 Nov 2022	Kejahatan	PERMOHONAN PENGETAHUAN DENGAN DASAR UU NO. 39 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010	Banding	Pengadilan Perkara Kejahatan	Dituntaskan	22 Jan 2023	Selesai
8. 188/Pdt.Sus.2022/Pn.Raha	05 Nov 2022	Kejahatan	PERMOHONAN PENGETAHUAN DENGAN DASAR UU NO. 39 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010	Banding	Pengadilan Perkara Kejahatan	Dituntaskan	22 Jan 2023	Selesai
9. 189/Pdt.Sus.2022/Pn.Raha	05 Nov 2022	Kejahatan	PERMOHONAN PENGETAHUAN DENGAN DASAR UU NO. 39 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010	Banding	Pengadilan Perkara Kejahatan	Dituntaskan	22 Jan 2023	Selesai
10. 190/Pdt.Sus.2022/Pn.Raha	05 Nov 2022	Kejahatan	PERMOHONAN PENGETAHUAN DENGAN DASAR UU NO. 39 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010	Banding	Pengadilan Perkara Kejahatan	Dituntaskan	22 Jan 2023	Selesai

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

- **Akreditasi Penjamin Mutu**

Pengadilan Negeri Raha terus berbenah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Muna, Muna Barat dan Buton Utara. Hal ini disebabkan karena pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan menjadi salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan. Selanjutnya, sertifikat jaminan mutu pelayanan peradilan harus dimiliki oleh setiap pengadilan di semua lingkungan Peradilan. Makamah Agung juga memandang penting peningkatan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan karena hal tersebut akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Badan Peradilan. Sinergitas internal dan eksternal harus dibangun agar perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua yakni mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung.

Pengadilan Negeri Raha yang merupakan salah satu Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, telah Mendapatkan Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai nilai A (excellent), yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1045/DJU/SK/OT01.3/3/2021 pada tanggal 10 Maret 2021 di Jakarta . Selain itu, Pengadilan Negeri Raha juga memperoleh predikat sebagai terbaik Harapan II dalam lomba bagi satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022 sesuai Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 2472/DJU/SK/HM.02.3/12/2022 tanggal 9 Desember 2022 untuk kategori Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

- **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk pengambilan melalui satu pintu.



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Raha terdiri dari Layanan Pokok meliputi : Penatausahaan surat dan Buku tamu, Meja Informasi, Meja Pengaduan, Meja I, Meja II, Meja III dan Petugas Pembayaran (Kasir) yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP. Untuk penatausahaan Surat masuk dan keluar pada Pengadilan Negeri Raha di tahun 2022 tercatat 1053 Surat Masuk, 3846 Surat Keluar, dan 1033 Tamu.

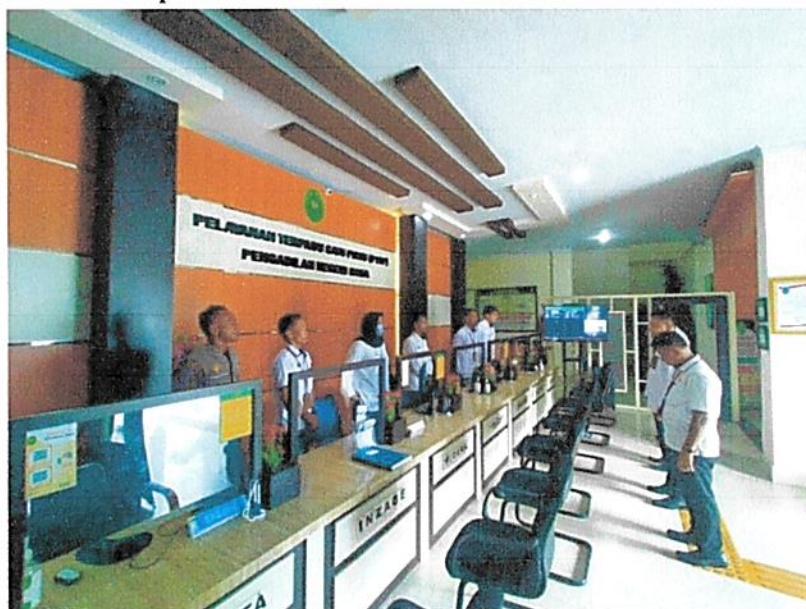
Pada Pengadilan Negeri Raha telah di Tunjuk Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Melalui SK Ketua Pengadilan Negeri Raha W23-U3/950/OT.01.3/2/2022 tentang penunjukan pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Raha.

Adapun pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut :

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Muhammad Sukamto, S.H., M.H. NIP. 197820826 200112 1 001	Hakim Madya Pratama / Ketua	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
2.	Abdul Hafid, SH. NIP. 19710510 199303 1 001	Panitera	Pejabat Pengelola PTSP
3.	M. Nasir NIP. 19650304 198603 1 003	Sekretaris	Pejabat Pengelola PTSP
4.	Darwis, S.H NIP. 19830103 200912 1 006	Panmud Hukum	Penanggung Jawab Pelayanan PTSP
5.	Agus Merdekawati, S.H NIP. 19830817 200704 2 001	Panmud Pidana	Penanggung Jawab Pelayanan PTSP
6.	Suwasta, S.H NIP. 19760810 201101 1 007	Panmud Perdata	Penanggung Jawab Pelayanan PTSP

7.	La Ode Sunia. S.Pd.I NIP. 19731231 199403 1 006	Kasubag Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Pelayanan PTSP
8.	Syamsu Alam NIP. 19691220 199303 1 003	Kasubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	Penanggung Jawab Pelayanan PTSP
9.	Yuliati, S.H NIP. 19870709 201212 2 001	Analis Perkara Peradilan	Petugas Pelayanan PTSP
10.	La Ode Abdul Julhia NIP. 19800727 201505 1 001	Pengadministrasi Hukum Perdata	Petugas Pelayanan PTSP
11.	Rizky Hendra Budi Prakoso NIP. 19951217 202012 1 006	Arsiparis	Petugas Pelayanan PTSP
12.	La Ode Muhammad Syahrul Ramadhan, SH	Pengolah Data Perkara Kepaniteraan Hukum	Petugas Pelayanan PTSP

Untuk meningkatkan kualitas Pelayanan bagi para pencari keadilan, Pengadilan Negeri Raha rutin melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Atasan Pejabat Pengelola PTSP, Hakim Pengawas PTSP, Pejabat pengelola PTSP, serta penanggung jawab pelayanan PTSP, kepada seluruh petugas Pelayanan PTSP setiap bulan sekali.



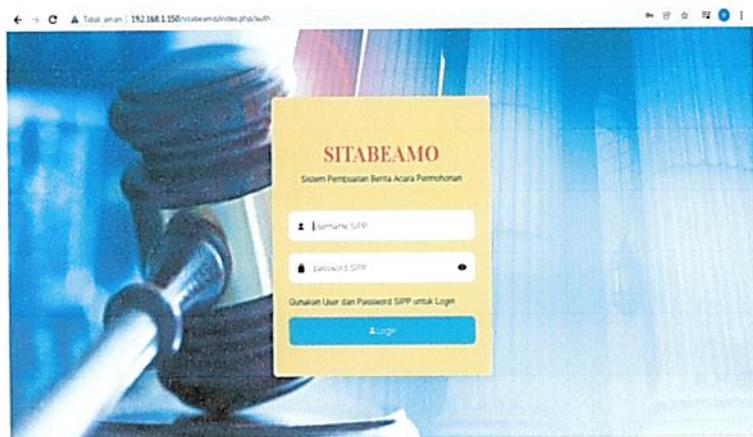
- Inovasi Pelayanan Publik

Ada beberapa inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Raha dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik:

1. SITABEAMO

Sitabeamo dalam Bahasa Muna artinya adalah permisi. Latar belakang diberlakukannya inovasi ini, karena belum adanya template berita acara perkara perdata permohonan perubahan nama yang disediakan dalam aplikasi SIPP. Kemudian beban kerja panitera pengganti yang semakin meningkat, karena peningkatan jumlah perkara, maupun karena adanya tugas-tugas tambahan yang dibebankan kepada panitera pengganti. Aplikasi SITABEAMO

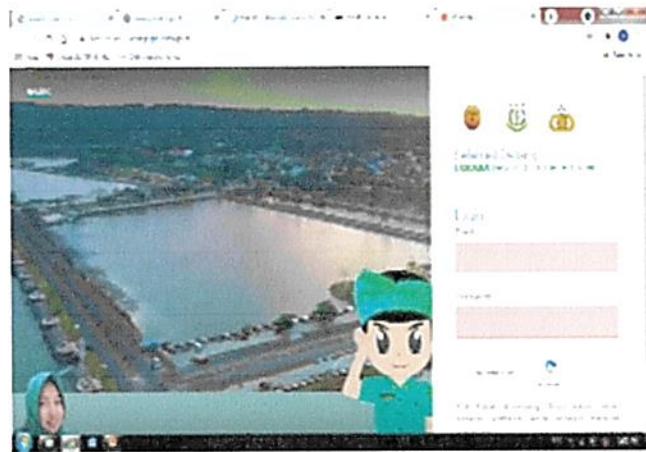
terintegrasi dengan SIPP, oleh karena itu manfaat dari aplikasi ini dapat membantu panitera pengganti dalam membuat berita acara sidang perkara perdata permohonan perubahan nama, sehingga proses minutasi perkara permohonan bisa lebih cepat. Dampak dari pemakaian aplikasi SITABEAMO adalah dapat terlaksananya kecepatan dalam pelayanan kepada pemohon dan terlaksananya *one day publish* dan *one day minutation*, serta tidak terjadi lagi kesalahan akibat copy paste, karena data pemohon langsung mengambil data dari SIPP.



2. LA SIAGA-E (LAYANAN PENYITAAN, PENGGELEDAHAN DAN PENAHANAN secara ELEKTRONIK)

Inovasi LA SIAGA-E merupakan aplikasi untuk layanan permohonan izin penyitaan, izin penggeledahan dan permintaan perpanjangan penahanan. Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan bagi Penyidik pada Polres Muna, Polres Buton Utara dan Kejaksaan Negeri Muna dalam hal permintaan persetujuan/ijin penyitaan, penggeledahan dan perpanjangan penahanan. Hal yang melatar belakangi digagasnya inovasi LA SIAGA-E adalah kondisi geografis wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, sehingga Penyidik sering terlambat mengajukan permintaan sita, geledah & penahanan. Kemudian keinginan Pengadilan Negeri Raha untuk mendukung percepatan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara dengan mempersiapkan teknologi informasi yang mumpuni, serta sebagai usaha untuk meminimalisir kontak erat antara Petugas PTSP dengan Pengguna Layanan dimasa Pandemi Covid-19. Dampak langsung dengan adanya inovasi LA SIAGA-E yaitu memberikan kemudahan bagi Penyidik karena dapat mengajukan permintaan persetujuan/ijin penyitaan, penggeledahan dan penahanan dari satker masing-masing, pelayanan izin sita, geledah dan penahanan dapat terlaksana lebih cepat, dan penularan Covid-19 menjadi rendah.

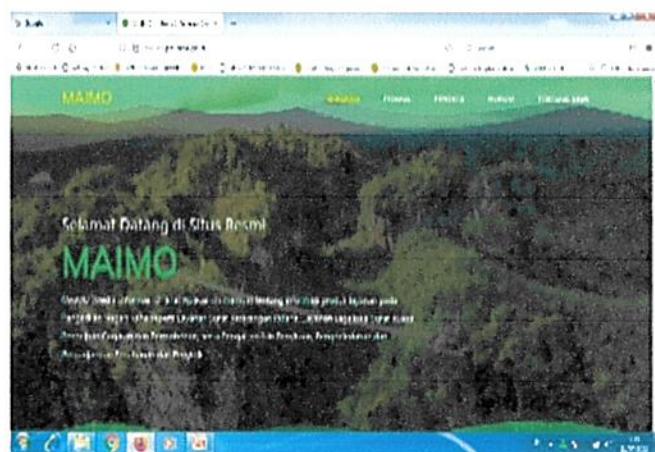
Inovasi ini juga melatarbelakangi pembuatan aplikasi E-PANDU yang saat ini telah diberlakukan pada setiap Pengadilan Negeri yang berada pada Wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.



3. MAIMO (MEDIA INFORMASI ONLINE)

MAIMO merupakan media informasi pada Pengadilan Negeri Raha yang berbasis online. MAIMO memuat informasi-informasi terkait produk layanan pada Pengadilan Negeri Raha, misalkan informasi tentang layanan surat keterangan pidana, persyaratan mengajukan gugatan, informasi persyaratan leges surat kuasa, dan leges akta notaris. Informasi tentang persyaratan permintaan izin penyitaan, dan penahanan serta informasi perkara, juga dapat dilihat pada media ini, karena terhubung dengan SIPP Web Pengadilan Negeri Raha. MAIMO dapat dikunjungi melalui link <http://maimo.pn-raha.go.id>. Hal yang melatarbelakangi digagasnya inovasi ini, dikarenakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha merupakan wilayah kepulauan, menyebabkan akses masyarakat yang ingin berurusan dengan Pengadilan Negeri Raha menjadi terhambat, khususnya terkait dengan informasi layanan Pengadilan Negeri Raha. Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait layanan pada Pengadilan Negeri Raha tersebut, harus jauh-jauh datang ke Kantor Pengadilan Negeri Raha, lalu bertemu dengan Petugas PTSP di Kantor Pengadilan Raha. Oleh karena itu, maka dibutuhkan sebuah media yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi layanan Pengadilan Negeri Raha. Dengan adanya media ini, tentu akan memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Muna, Muna Barat dan Buton Utara, dalam memenuhi kebutuhan informasi yang berkaitan dengan produk layanan Pengadilan Negeri Raha. Dampak langsung bagi pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Raha, dengan adanya inovasi MAIMO, maka masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi layanan, tanpa harus datang ke Kantor Pengadilan Negeri Raha. Selanjutnya kualitas pelayanan menjadi meningkat, dan juga bisa

mengurangi kontak erat antara Petugas PTSP dan pengguna layanan, terlebih dimasa pandemi Covid-19.



4. E-BROSUR

E-BROSUR adalah brosur elektronik Pengadilan Negeri Raha yang berisi tentang informasi-informasi pelayanan peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Raha. Kegunaan aplikasi E-BROSUR berfungsi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat pencari keadilan melalui website maupun media sosial. E-BROSUR adalah sebagai penyempurna dari MAIMO, dan saling melengkapi. Dalam aplikasi E-BROSUR para pengguna layanan Pengadilan Negeri Raha dapat mengunduh brosur-brosur pada medsos-medsos dan website Pengadilan Negeri Raha. Hal yang melatarbelakangi digagasnya inovasi E-BROSUR, yakni penyebaran brosur informasi pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Raha masih dilakukan secara manual di masa pandemi Covid-19. Bawa dampak langsung dengan adanya inovasi E-BROSUR, masyarakat pencari keadilan tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri Raha untuk mencari informasi tentang layanan peradilan. Masyarakat cukup membuka website untuk mengakses E-BROSUR atau menscan QR Code Layanan Peradilan yang ada di media sosial Pengadilan Negeri Raha.



BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Dalam rangka mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan, perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya, untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Mahkamah Agung RI No 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Perma tersebut sekaligus mencabut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.

Dalam Perma tersebut disebutkan bahwa Setiap atasan langsung berkewajiban antara lain:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus.
- b. Mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dilaksanakan paling sedikit sebulan sekali dengan :

- a. memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. meminta laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas bawahan;
- c. mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya;
- d. merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah - langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait; dan berkonsultasi kepada atasan

langsungnya secara berjenjang dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukannya.

Pembinaan dilaksanakan dengan:

- a. menjelaskan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan bawahan dalam struktur organisasi di bawah kendalinya secara berkala;
- b. menetapkan dan menyetujui sasaran kinerja bawahan serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan;
- c. menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur atau cara pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang di nilai kurang jelas atau belum diatur secara khusus; dan
- d. membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Negeri Raha, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Negeri Raha telah menunjuk Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : W23-U3/952/OT.01.3/2/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

No	Nama	Jabatan	Hakim Pengawas Bidang
1	Ari Conardo, S.H.	Hakim	Pidana
2	Melby Nurrahman, S.H.	Hakim	Perdata
3	Dio Dera Darmawan,S.H.	Hakim	Hukum
4	Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.	Hakim	Kepgawaiian, dan Ortala
5	Yuri Stiadi, S.H.	Hakim	Perencanaan, TI dan Pelaporan
6	Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn.	Hakim	Umum dan Keuangan

2. Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Raha telah mengikuti rapat Pembinaan dan Pengawasan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Ketua, Panitera dan Sekretaris melakukan pengawasan kepada para Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Raha, pengawasan dilakukan secara langsung.

B. Evaluasi

Pencapaian tujuan pengawasan tidaklah sepenuhnya diindikasikan dengan adanya data dan angka secara kuantitatif saja, karena pemberian dunia peradilan di indonesia merupakan suatu proses dimana berbagai aspek harus berperan secara komprehensif ke arah terwujudnya budaya kerja dan etos kerja yang diharapkan dapat menunjang suatu bentuk peradilan yang dikehendaki, sehingga aspek pembinaan yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan kepada segi kontrol pengendalian menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari aspek pengawasan.

Sebagai realisasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI No 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, maka Pengadilan Negeri Raha telah melakukan berbagai upaya, antara lain :

1. Mengadakan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI No 8 Tahun 2016 kepada seluruh aparat Pengadilan Negeri Raha.
2. Mengadakan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI No 8 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
3. Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Negeri Raha, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera, Sekretaris dan Jajarannya
4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan
5. Dalam rangka tertib administrasi keuangan perkara dan persiapan akan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan oleh BPK, maka Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawas telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan keuangan perkara Pengadilan Negeri Raha.
6. Mengadakan rapat berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
7. Memberi sanksi jika terdapat staf/pegawai yang melanggar disiplin.

8. Pengawasan yang dilakukan insidentil sesuai kebutuhan dan kondisi di tiap bagian.

Adanya Pengawasan yang dilakukan secara berkala maupun insidentil dan penyelesaian permasalahan yang dilakukan langsung baik melalui rapat pertemuan pemangku jabatan ataupun koordinasi penyelesaian secara bertahap di Pengadilan Negeri Raha, terbukti dapat meminimalisir temuan masing-masing bagian setiap bulannya. Sehingga, di beberapa pertemuan rapat rutin pengawasan ditemukan bagian yang hasil laporan temuan hakim pengawasan nihil, untuk itu pertemuan juga membahas langkah-langkah pereventif untuk mempertahankan kinerja setiap bagian dan inovasi yang dapat meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Raha.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, para pegawai perlu diikutsertakan pada pelatihan-pelatihan atau pendidikan yang menjurus ke bidang administrasi yang telah diadakan oleh Mahkamah Agung RI atau instansi lain.
2. Pembinaan dan Pengawasan telah dilakukan lewat pertemuan rutin bulanan terhadap seluruh Karyawan Pengadilan Negeri Raha.
3. Kondisi Fasilitas Sarana Lingkungan Kantor yang masih sangat perlu dilakukan pembenahan utamanya pagar keliling kantor sejak tahun didirikannya, tidak pernah diperbaharui ataupun direnovasi hingga kurang memberikan kenyamanan dan keamanan kantor Pengadilan Negeri Raha
4. Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini untuk menunjang persidangan secara virtual pada Pengadilan Negeri Raha kiranya dapat diberikan tambahan peralatan pendukung persidangan sehingga semua ruang sidang dapat menggunakan peralatan persidangan secara online

B. Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kerja para tenaga administrasi serta Hakim perlu diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan teknis Yustisial maupun administrasi.
2. Untuk meningkatkan prestasi dan kualitas kerja, perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung maupun oleh instansi yang berwenang secara rutin.
3. Renovasi atau Pembangunan Fasilitas Sarana Lingkungan Kantor perlu di realisasikan untuk kemudahan dalam pengajuan anggaran renovasi Fasilitas Sarana Lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Raha
4. Pengadaan fasilitas pendukung persidangan secara online sangat perlu untuk segera direalisasikan seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang disidangkan secara virtual

Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022 ini disusun untuk menjadi bahan informasi dan telaah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kami menyadari bahwa laporan ini banyak kekurangan baik

materi yang disajikan maupun sistematika penyajiannya, oleh karenanya kami mengharap saran dan tanggapan dari semua pihak agar pelaksanaan kegiatan tugas di masa mendatang makin tertib, baik, benar dan tepat.

Raha, 6 Januari 2023

